

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar belakang.....	1
I.2. Landasan hukum.....	2
I.3. Maksud dan tujuan.....	3
I.4. Sistematika penulisan.....	3
BAB II EVALUASI RENJA S/D TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	6
II.1. Evaluasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2020	6
II.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat	10
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	16
BAB IV PENUTUP	21

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2020 Kabupaten Sidenreng Rappang.....	13
Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Sidenreng Rappang	18

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 050/4171/Bappelitbangda tanggal 30 Juli 2020 perihal Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020, maka Perangkat daerah perlu segera melakukan penyesuaian dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diawali dengan menyusun Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020.

Perubahan Renja Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja kegiatan, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan, dan perubahan kelompok sasaran kegiatan.

I. 2. Landasan Hukum

Landasan hukum Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang;

12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor _____ Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja untuk menyesuaikan sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja sesuai dengan perkembangan keadaan serta menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Inspektorat Daerah, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja yaitu sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berupa rencana program dan kegiatan tahunan dalam rangka mencapai misi Inspektorat Daerah.

I.4.Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Renja ini memuat Program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Sistematika penyajian Perubahan Renja Tahun 2020 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

I.1. Latar Belakang

Mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan Renja Perangkat Daerah dan proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

I.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari perubahan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II : EVALUASI RENJA S/D TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

II.1. Evaluasi RENJA s/d Triwulan II Tahun 2020

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2020.

II.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi, dan Misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

Bab III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat urusan/bidang urusan/program/kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahandan tidak mengalami perubahan.

Bab IV : PENUTUP

Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindaklanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA S/D TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

II.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2020

Inspektorat Daerah tahun 2020 telah melaksanakan 5 (lima) program dan 20 (dua puluh) kegiatan, terhadap masing-masing program dan kegiatan tersebut telah dievaluasi dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi baik anggaran maupun capaian indikatornya, dengan hasil sebagai berikut :

II.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dengan anggaran program sebesar Rp.632.467.800,00 dan realisasi sebesar Rp. 252.487.309,00 atau 39,92 %. Target kinerja 90% dan realisasi 40% dengan tingkat capaian kinerja 44%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat, indikator output : Materai dan dokumen yang terkirim, target kinerja 250 dan terealisasi 112 dengan capaian kinerja 44,80%.
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, indikator output : Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, target kinerja 12 bulan dan terealisasi 6 dengan capaian kinerja 50,00%.
- c. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah, indikator output : Jasa jaminan milik daerah yang disediakan, target kinerja 12 bulan dan terealisasi 0 dengan capaian kinerja 0,00%.
Belum adanya realisasi atas kegiatan ini dikarenakan proses pengadaan penyedia jasa asuransi masih dalam proses dan menunggu hasil dari Bagian PBJ Setda.
- d. Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional, indikator output : Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

- dinas/operasional yang disediakan, target kinerja 20 randis dan terealisasi 10 dengan capaian kinerja 50,00%.
- e. Penyediaan jasa administrasi keuangan, indikator output : Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan, target kinerja 12 bulan dan terealisasi 6 dengan capaian kinerja 50,00%.
 - f. Penyediaan jasa kebersihan kantor, indikator output : Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor, target kinerja 12 bulan dan terealisasi 6 dengan capaian kinerja 50,00%.
 - g. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah, indikator output : Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, target kinerja 4 kali dan terealisasi 0 dengan capaian kinerja 0,00%. Belum adanya realisasi atas kegiatan ini dikarenakan tidak ada kegiatan dalam daerah yang memerlukan SPPD dalam daerah.
 - h. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah, indikator output : Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, target kinerja 50 kali dan terealisasi 31 dengan capaian kinerja 62,00%.
 - i. Pelayanan Administrasi Perkantoran, indikator output : Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, target kinerja 12 bulan dan terealisasi 6 dengan capaian kinerja 50,00%.

II.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Dengan anggaran program sebesar Rp.121.000.00 dan realisasi sebesar Rp. 23.669.598.00 atau 19.43 %. Target kinerja 85% dan realisasi 28% dengan tingkat capaian kinerja 33%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pembangunan gedung kantor, indikator output : Jumlah gedung kantor yang dibangun, target kinerja 1 gedung dan terealisasi 1 dengan capaian kinerja 100,00%.

Kegiatan ini awalnya pembangunan gedung tetapi tetapi karena adanya refocussing anggaran maka untuk fisik gedung ditunda tetapi untuk dokumen perencanaan tetap dilaksanakan.

- b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, indikator output : Pemeliharaan gedung kantor, target kinerja 1 gedung dan terealisasi 0

dengan capaian kinerja 0,00%. Kegiatan ini direncanakan pada Triwulan III.

- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, indikator output : Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional, target kinerja 20 unit dan terealisasi 7 dengan capaian kinerja 35,00%.
- d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, indikator output : Pemeliharaan peralatan gedung kantor, target kinerja 8 unit dan terealisasi 11 dengan capaian kinerja 137,50%.

II.1.3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Dengan anggaran program sebesar Rp.753.000.00 dan realisasi sebesar Rp. 643.000.00 atau 85.39 %. Target kinerja 100% dan realisasi 80% dengan tingkat capaian kinerja 80%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, indikator output : Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja & keuangan, target kinerja 5 laporan dan terealisasi 4 dengan capaian kinerja 80,00%.

II.1.4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Dengan anggaran program sebesar Rp.1.027.583.200.00; realisasi anggaran sebesar Rp. 554.901.000.00 atau 54.00%. Target kinerja 14% dan realisasi 0%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, indikator output : Laporan hasil pemeriksaan, target kinerja 23 laporan dan terealisasi 3 dengan capaian kinerja 13,04%.

Masih rendahnya capaian kinerja karena sebagian besar kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

- b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, indikator output : Pengaduan yang ditindaklanjuti, target kinerja 5 kasus dan realisasi 1 dengan capaian kinerja 20.00%.

Kegiatan ini terlaksana berdasarkan pada pengaduan yang masuk.

- c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH, indikator output : Pelaksanaan monev, reviu dan pengawasan lainnya, target kinerja 20 laporan dan realisasi 21 dengan capaian kinerja 105.00%.
- d. Inventarisasi temuan pengawasan, indikator output : Pelaksanaan kegiatan inventarisasi temuan pengawasan, target kinerja 1 laporan dan realisasi 1 dengan capaian kinerja 100.00%.

II.1.5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Dengan anggaran program sebesar Rp. 23.230.000.00; realisasi anggaran 2.725.000.00 atau 11.73%. Target kinerja 5% dan realisasi 5% dengan tingkat capaian kinerja 100%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, indikator output : Pegawai yang mengikuti diklat pembentukan/ penjenjangan sertifikasi JFT, target kinerja 1 orang dan realisasi 1 dengan capaian kinerja 100.00%.
- b. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja, indikator output : Pegawai yang mengikuti pelatihan / bimtek, target kinerja 2 orang dan realisasi 2 dengan capaian kinerja 100.00%.

Selanjutnya kaitan antara realisasi program dan kegiatan Renja s/d Triwulan II dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah *dapat dilihat pada tabel 2.1.*

- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah.

Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah yang berisi target capaian dari setiap program / kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Dengan adanya target yang telah ditetapkan tersebut, maka realisasinya ada yang tercapai dan ada yang tidak tercapai.

Dari data yang telah disampaikan pada tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa, pada umumnya realisasi capaian untuk program / kegiatan adalah mencapai target yang diharapkan sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan. Sehingga pada pelaksanaannya dengan anggaran yang tersedia bisa melampaui/tidak mencapai target yang diharapkan.

Untuk itu, kedepan target yang diusulkan akan disesuaikan kembali dengan melihat perbandingan di tahun – tahun sebelumnya maupun perbandingan dengan dokumen Renstra Inspektorat Daerah. Dengan adanya penyesuaian target dimaksud diharapakan dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, sehingga pelaksanaan program / kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan maksimal.

- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut terdiri dari :
 - 1) Meningkatkan komitmen dan integritas pengawas / auditor dengan mengikuti bimbingan teknis maupun diklat yang berhubungan dengan pengawasan;
 - 2) Mengusulkan peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan pada APBD;
 - 3) Mengoptimalkan koordinasi antara aparat pengawasa internal maupun eksternal sesuai program kerja pengawasan tahunan (PKPT) dengan aparat pengawasan didaerah maupun dipusat;
 - 4) Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi pembina jabatan fungsional pengawasan.

II.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud untuk mendukung Visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, khususnya misi ke 5 yaitu : **Mengoptimalkan Kinerja, Kualitas Dan Profesionalitas Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Melalui Penerapan Good Governance Dan Electronic Governance**, tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah telah sesuai dengan target yang ditetapkan terutama untuk Program Peningkatan Pengawasan Sistem Pengawasan Internal yang merupakan program utama Inspektorat Daerah dapat tercapai sesuai target.

Telah ada koordinasi dan sinergi program antara Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Provinsi SULSEL maupun Inspektorat dan Kementerian tingkat pusat karena setiap tahun selalu ada Rakorwas (Rapat Koordinasi Pengawasan)

tingkat Provinsi yang melibatkan semua inspektorat kabupaten/kota se Provinsi SULSEL maupun tingkat Nasional (Rakorwasnas) yang melibatkan seluruh inspektorat provinsi, kabupaten kota dan Irjend Kementerian.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah antara lain :

1. Masih rendahnya implementasi SPIP dan SAKIP pada Perangkat Daerah.
2. Kualitas dan jumlah SDM aparatur pengawasan yang masih dirasa kurang khususnya fungsional auditor/P2UPD sedangkan ruang lingkup pengawasan semakin luas.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan.
4. Terbatasnya anggaran pengawasan.

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, terhadap pencapaian visi misi KDH, dimana indikator kinerja untuk Inspektorat Daerah adalah Nilai SAKIP. Target terhadap nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten untuk Tahun 2020 adalah 55,55 (CC).

Sedangkan terhadap capaian program nasional, untuk Inspektorat Daerah adalah Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi dari KPK dan Stranas PK dari KPK, Verifikasi LHKPN, Operasionalisasi Saber Pungli, Pengendalian Gratifikasi, dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan :

1. Adanya peraturan yang dinamis
2. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel dan bebas dari KKN
3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan oleh OPD
4. Implementasi pengendalian intern pada Perangkat Daerah masih belum berjalan dengan baik
5. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah.

Peluang dalam meningkatkan pelayanan :

1. Adanya komitmen dari Pemerintah untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi
2. Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang pejabat sudah semakin meningkat
3. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk meningkatkan prestasi dibidang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Beberapa hal yang menjadi catatan dari hal tersebut diatas diantaranya adalah :

1. Perlunya komitmen bersama antar pimpinan OPD dalam penegakan penyelenggaraan pemerintahan yang berwibawa, bersih dan bebas KKN.
2. Perlunya komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah.
3. Peningkatan Implementasi SAKIP yang baik pada Perangkat Daerah.
4. Melaksanakan pengendalian intern antara pimpinan dan staf di masing-masing OPD (SPIP)
5. Perlunya kesadaran OPD dalam menindak lanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK dan APIP.
6. Pemenuhan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP.
7. Perlunya komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra Inspektorat s/d Triwulan II Tahun 2020
Kabupaten Sidenreng Rappang

SKPD : INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2020			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program / Kegiatan SKPD s/d Tahun berjalan 2020	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
4.06	Urusan Penunjang Pengawasan								
4.06.01	Inspektorat								
4.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	90%		90%	40%	44%	40%	44%
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	1966 lembar	250	250	112	44,80	362	18,41
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bln	12	12	6	50,00	18	30,00
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Waktu penyediaan jasa jaminan milik daerah	60 bln	12	12	0	0,00	12	20,00
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan	102 unit	21	20	10	50,00	31	30,39
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	60 bln	12	12	6	50,00	18	30,00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60 bln	12	12	6	50,00	18	30,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg tersedia	62 unit		0	0	0,00	0	0,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang-undangan	20 exemplar		0	0	0,00	0	0,00
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	356 kali	79	50	31	62,00	110	30,90
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60 kali	0	4	0	0,00	0	0,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia	60 bln	12	12	6	50,00	18	30,00
4.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase asset dalam kondisi baik	85%		85%	28%	33%	28%	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2020			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program / Kegiatan SKPD s/d Tahun berjalan 2020	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
1	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit		1	1	0,00	1	100,00
	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	42 unit		0	0	0,00	0	0,00
	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	141 unit	50	0	0	0,00	50	35,46
	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	51 unit	0	0	0	0,00	0	0,00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 unit	1	1	0	0,00	1	20,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	102 unit	18	20	7	35,00	25	24,51
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	86 unit	12	8	11	137,50	23	26,74
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung kantor kantor yang direhabilitasi sedang/berat	3 unit	0	-	-	0,00	0	0,00
4.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Percentase keterpenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan kinerja yang tetap waktu	100%		100%	80%	80%	80%	80%
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kineria SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	25 lap	5	5	4	80,00	9	36,00
4.06.01.15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Percentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2 keatas	42%		14%	0%	0%	0%	0%
	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Laporan monev, reviu dan pengawasan lainnya	119 laporan	26	20	21	105,00	47	39,50
	Penanganan Kasus Pengaduan Di lingkungan Pemda	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti	25 kasus	5	5	1	20,00	6	24,00
	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Laporan inventarisasi temuan pengawasan	5 laporan	1	1	1	100,00	2	40,00
	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Laporan monitoring tlhp	10 laporan	1	0	0	0,00	1	10,00
	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Laporan hasil pemeriksaan	138 LHP	26	23	3	13,04	29	21,01

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2020			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program / Kegiatan SKPD s/d Tahun berjalan 2020	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
4.06.01.16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Cakupan aparatur yg mendapatkan pelatihan kompetensi dibidangnya	82%		5%	5%	100%	5%	6%
	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pegawai yang mengikuti diklat pembentukan/ penjenjangan sertifikasi JET	20 org	5	1	1	100,00	6	30,00
	Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kineria	Pegawai yang mengikuti pelatihan / bimtek	181 org	36	2	2	100,00	38	20,99

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil evaluasi Renja sampai dengan triwulan II, dimana rata-rata realisasi output kegiatan dan realisasi anggarannya ada yang sesuai target dan ada yang perlu ditingkatkan capaiannya, maka dirasa perlu untuk menyusun Perubahan Renja Tahun 2020.

Adapun perubahan tersebut terdiri dari 5 program dan 20 kegiatan sebagai berikut :

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari :
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon;
 - 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 - 4) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
 - 5) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - 6) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - 7) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 - 8) Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - 9) Pelayanan administrasi perkantoran
- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari :
 - 1) Pembangunan Gedung Kantor
 - 2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
 - 4) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- IV. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH, terdiri dari :

- 1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
 - 2) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kdh
 - 3) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda
 - 4) Inventarisasi temuan pengawasan
- V. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, terdiri dari :
- 1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
 - 2) Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.
- Rumusan rencana program dan kegiatan *dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :*

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020
Kabupaten Sidenreng Rappang

SKPD : INSPEKTORAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Tahun Anggaran 2020							
			Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4 06 06	Urusan Penunjang Pengawasan								
	4 06 01	Inspektorat								
4 06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		90%	632.467.800			90%	632.467.800	
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	Inspektorat	250 Materai	1.350.000		Inspektorat	250 Materai	1.350.000
	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Inspektorat	12 bulan	61.320.000		Inspektorat	12 bulan	61.320.000
	05	Jasa Jaminan barang Milik Daerah	Waktu penyediaan jasa jaminan milik daerah	Inspektorat	12 bulan	10.000.000		Inspektorat	12 bulan	10.000.000
	06	Jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan	Inspektorat	20 unit	23.700.000		Inspektorat	20 unit	23.700.000
	07	Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	Inspektorat	12 bulan	617.000		Inspektorat	12 bulan	617.000
	08	Jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Inspektorat	12 bulan	20.635.800		Inspektorat	12 bulan	20.635.800
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg tersedia	Inspektorat	14 unit	-		Inspektorat	14 unit	-
	12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang	Inspektorat	5 exp	-		Inspektorat	5 exp	-
	18	Rapat Koordinasi Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	K/L/D	50 kali	270.000.000		K/L/D	50 kali	270.000.000
	17	Rapat Koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten Sidrap	4 kali	1.500.000		Kabupaten Sidrap	4 kali	1.500.000
	20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia	Inspektorat	12 bulan	243.345.000		Inspektorat	12 bulan	243.345.000

KODE		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Tahun Anggaran 2020							
				Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4 06 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Percentase aset dalam kondisi baik		85%	121.800.000			85%	121.800.000		
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Inspektorat	1	60.000.000		Inspektorat	1	60.000.000		
	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Inspektorat	15 unit	-		Inspektorat	15 unit	-		
	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Inspektorat	21 unit	-		Inspektorat	21 unit	-		
	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Inspektorat	18 unit	-		Inspektorat	18 unit	-		
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Inspektorat	1 unit	1.500.000		Inspektorat	1 unit	1.500.000	
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Inspektorat	20 unit	58.550.000		Inspektorat	20 unit	58.550.000	
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Inspektorat	6 unit	1.750.000		Inspektorat	6 unit	1.750.000	
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung kantor kantor yang direhabilitasi sedang/berat	Inspektorat	1 unit	-		Inspektorat	1 unit	-	
4 06 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Percentase keterpenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan kinerja yang tepat waktu		100%	753.000			100%	753.000		
	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Inspektorat	5 laporan	753.000		Inspektorat	5 laporan	753.000	
4 06 01 15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan KDH	Percentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2 keatas		14%	1.027.583.200			14%	1.027.583.200		
	01	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Laporan monev, reviu dan pengawasan lainnya	Skpd/Unit Kerja	15 laporan	520.432.000		Skpd/Unit Kerja	15 laporan	520.432.000	
	09	Penanganan Kasus Pengaduan Di lingkungan Pemda	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti	Pemkab Sidrap	5 kasus	21.241.000		Pemkab Sidrap	5 kasus	21.241.000	
	07	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Laporan inventarisasi temuan pengawasan	Inspektorat	1 laporan	15.554.000		Inspektorat	1 laporan	15.554.000	
	06	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Laporan monitoring tlhp	Skpd/Unit Kerja	2 laporan	-		Skpd/Unit Kerja	2 laporan	-	

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Tahun Anggaran 2020							
					Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		10	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Laporan hasil pemeriksaan	Skpd/Unit Kerja	15 laporan	470.356.200		Skpd/Unit Kerja	15 laporan	470.356.200	
4	06	01	16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Cakupan aparatur yg mendapatkan pelatihan kompetensi dibidangnya		5%	23.230.000		5%	23.230.000	
		01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pegawai yang mengikuti diklat pembentukan/ penjenjangan sertifikasi JFT	Lembaga Diklat K/L/D	1 orang	17.976.000		Lembaga Diklat K/L/D	1 orang	17.976.000	
		02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Pegawai yang mengikuti pelatihan / bimtek	Lembaga Diklat K/L/D	2 orang	5.254.000		Lembaga Diklat K/L/D	2 orang	5.254.000	
JUMLAH							1.805.834.000				1.805.834.000	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan perubahan tahun anggaran 2020 dilingkup Inspektorat Daerah.

Dalam upaya mencapai target tahun 2020, seluruh perubahan yang terjadi dalam program/kegiatan tahun 2020 mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir tahun 2020 sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja.

Dengan demikian pelaksana program dan kegiatan diharapkan dapat mempedomani isi dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 ini dengan sebaik-baiknya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Selanjutnya bahwa penyusunan Perubahan Renja ini jauh dari sempurna, maka dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, 24 Agustus 2020

INSPEKTUR DAERAH



DR. M.UH. ROHADY RAMADHAN, S.I.P, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19710318 199101 1 003